



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 124 Maret 2022

Nomor : 131/2188/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usul Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Yang Masa
Jabatannya Berakhir Pada
Tahun 2022.

Yth. 1. Para Gubernur (daftar terlampir)
2. Para Ketua DPRD Provinsi
(daftar terlampir)
3. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota
(daftar terlampir)
di-
Tempat

Berkenaan dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Masa Jabatannya Berakhir Pada Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa "Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian".
2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, diminta kepada:
 - a. Pimpinan DPRD Provinsi untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi tentang pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali kota dan/atau Wakil Wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota tentang pengumuman usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali kota dan/atau Wakil Wali kota.
3. Usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali kota dan/atau Wakil Wali kota, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Wali kota dan/atau Wakil Wali kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Bupati dan Wali kota (daftar terlampir).

LAMPIRAN

DAFTAR DAERAH

- 1 PROVINSI ACEH
- 2 PROVINSI SUMATERA UTARA
- 3 PROVINSI SUMATERA BARAT
- 4 PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5 PROVINSI RIAU
- 6 PROVINSI JAMBI
- 7 PROVINSI BENGKULU
- 8 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 9 PROVINSI LAMPUNG
- 10 PROVINSI DKI JAKARTA
- 11 PROVINSI BANTEN
- 12 PROVINSI JAWA BARAT
- 13 PROVINSI JAWA TENGAH
- 14 PROVINSI JAWA TIMUR
- 15 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- 16 PROVINSI BALI
- 17 PROVINSI GORONTALO
- 18 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- 19 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- 20 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- 21 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
- 22 PROVINSI SULAWESI UTARA
- 23 PROVINSI SULAWESI BARAT
- 24 PROVINSI SULAWESI TENGAH
- 25 PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 26 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- 27 PROVINSI MALUKU UTARA
- 28 PROVINSI MALUKU
- 29 PROVINSI PAPUA BARAT
- 30 PROVINSI PAPUA
- 31 KOTA BANDA ACEH
- 32 KOTA LHOKSEUMAWE ✓
- 33 KOTA LANGSA ✓
- 34 KOTA SABANG ✓
- 35 KOTA TEBINGTINGGI ✓
- 36 KOTA PAYAKUMBUH ✓
- 37 KOTA PEKANBARU ✓
- 38 KOTA CIMAH ✓
- 39 KOTA TASIKMALAYA ✓
- 40 KOTA SALATIGA ✓
- 41 KOTA YOGYAKARTA ✓
- 42 KOTA BATU ✓
- 43 KOTA KUPANG ✓
- 44 KOTA SINGKAWANG ✓
- 45 KOTA KENDARI ✓
- 46 KOTA AMBON ✓
- 47 KOTA JAYAPURA ✓
- 48 KOTA SORONG ✓
- 49 KABUPATEN ACEH BESAR ✓
- 50 KABUPATEN ACEH UTARA ✓
- 51 KABUPATEN ACEH TIMUR ✓
- 52 KABUPATEN ACEH JAYA ✓

- 53 KABUPATEN BENER MERIAH ✓
- 54 KABUPATEN PIDIE ✓
- 55 KABUPATEN SIMEULUE ✓
- 56 KABUPATEN ACEH SINGKIL ✓
- 57 KABUPATEN BIREUEN ✓
- 58 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ✓
- 59 KABUPATEN ACEH TENGGARA ✓
- 60 KABUPATEN GAYO LUES ✓
- 61 KABUPATEN ACEH BARAT ✓
- 62 KABUPATEN NAGAN RAYA ✓
- 63 KABUPATEN ACEH TENGAH ✓
- 64 KABUPATEN ACEH TAMIANG ✓
- 65 KABUPATEN TAPANULI TENGAH ✓
- 66 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI ✓
- 67 KABUPATEN KAMPAR ✓
- 68 KABUPATEN MUARO JAMBI ✓
- 69 KABUPATEN SAROLANGUN ✓
- 70 KABUPATEN TEBO ✓
- 71 KABUPATEN MUSI BANYUASIN ✓
- 72 KABUPATEN BENGKULU TENGAH ✓
- 73 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT ✓
- 74 KABUPATEN PRINGSEWU ✓
- 75 KABUPATEN MESUJI ✓
- 76 KABUPATEN LAMPUNG BARAT ✓
- 77 KABUPATEN TULANG BAWANG ✓
- 78 KABUPATEN BEKASI ✓
- 79 KABUPATEN BANJARNEGARA ✓
- 80 KABUPATEN BATANG ✓
- 81 KABUPATEN JEPARA ✓
- 82 KABUPATEN PATI ✓
- 83 KABUPATEN CILACAP ✓
- 84 KABUPATEN BREBES ✓
- 85 KABUPATEN KULON PROGO ✓
- 86 KABUPATEN BULELENG ✓
- 87 KABUPATEN FLORES TIMUR ✓
- 88 KABUPATEN LEMBATA ✓
- 89 KABUPATEN LANDAK ✓
- 90 KABUPATEN BARITO SELATAN ✓
- 91 KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT ✓
- 92 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ✓
- 93 KABUPATEN BARITO KUALA ✓
- 94 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ✓
- 95 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ✓
- 96 KABUPATEN BANGAI KEPULAUAN ✓
- 97 KABUPATEN BUOL ✓
- 98 KABUPATEN TAKALAR ✓
- 99 KABUPATEN MUNA BARAT ✓
- 100 KABUPATEN BUTON SELATAN ✓
- 101 KABUPATEN BUTON TENGAH ✓
- 102 KABUPATEN BOMBANA ✓
- 103 KABUPATEN KOLAKA UTARA ✓
- 104 KABUPATEN BUTON ✓
- 105 KABUPATEN BOALEMO ✓
- 106 KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT ✓
- 107 KABUPATEN BURU ✓
- 108 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT ✓
- 109 KABUPATEN MALUKU TENGAH ✓
- 110 KABUPATEN PULAU MOROTAI ✓
- 111 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH ✓

- 112 KABUPATEN NDUGA
- 113 KABUPATEN LANNY JAYA
- 114 KABUPATEN SARMI
- 115 KABUPATEN MAPPI
- 116 KABUPATEN TOLIKARA
- 117 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
- 118 KABUPATEN JAYAPURA
- 119 KABUPATEN PUNCAK JAYA
- 120 KABUPATEN DOGIYAI
- 121 KABUPATEN TAMBRAUW
- 122 KABUPATEN MAYBRAT
- 123 KABUPATEN SORONG
- 124 KABUPATEN INTAN JAYA